



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP MANAJEMEN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR MELALUI KAJIAN LITERATUR

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY TOWARDS EDUCATIONAL MANAGEMENT IN PRIMARY SCHOOLS THROUGH LITERATURE REVIEW

Mutiatul Khaerah¹, Putri Sanda Aulia², Mihra³, Hasnah⁴, Reski Dewi Astika⁵

PGSD, FKIP, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: kmutiatul770@gmail.com¹, Putrisndaaa08@gmail.com², mihramihra501@gmail.com³,
hasnahbasir725@gmail.com⁴, reskidewiastika29@gmail.com⁵

Article history :

Received : 11-01-2025
Revised : 12-01-2025
Accepted: 14-01-2025
Published: 17-01-2025

Abstract

The purpose of writing this research is to describe the Implementation of Government Policy on Education Management in Elementary Schools. Because the problem of government policy in the implementation of Education management is a strategic issue in the agenda of implementing education. The research method uses the Literature Review method as the main approach to collecting and analyzing data (Subagiya, 2023). The literature used includes various reliable sources such as scientific journals, reference books, research reports, and relevant articles that discuss the Implementation of Government Policy on Education Management in Elementary Schools. As a result, the implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 has an impact on every citizen aged 7-12 years who is required to take Basic Education and the poor are free of charge until they reach the age of compulsory education of 9 years.

Keywords: *Government Policy, Implementation of Education Management, Improving the Quality of Education*

Abstrak

Tujuan penulisan penelitian mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar. Karena masalah kebijakan pemerintah dalam implementasi manajemen Pendidikan merupakan persoalan strategis dalam agenda pelaksanaan pendidikan. Metode penelitian menggunakan metode Literature Review sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data (Subagiya, 2023). Literatur yang digunakan mencakup berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, serta artikel relevan yang membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar. Hasilnya, implementasi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dampak bagi setiap warga Negara yang berusia 7-12 tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan masyarakat yang tidak mampu digratiskan tanpa pungutan biaya sampai mencapai usia wajib belajar 9 tahun.

Kata Kunci : **Kebijakan Pemerintah, Penyelenggaraan Manajemen Pendidikan, Peningkatan Mutu Pendidikan**

PENDAHULUAN

Perbaikan dan pengembangan sekolah telah menjadi pusat perhatian utama pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang ingin mereformasi sistem pendidikan



yang ada guna mewujudkan penyelenggaraan sekolah yang efektif. Kala itu pemerintah resmi memberlakukan Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian disusul dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tentang sistem manajemen berbasis sekolah dengan pemberian kewenangan terhadap daerah (bahkan sekolah) dalam mengelola pendidikan secara otonomi sehingga kepentingan, kebutuhan serta potensi daerah menjadi lebih bisa dikelola (Hakim, 2019). Adapun kepala sekolah bersama dengan guru diwajibkan mengelola sekolah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditentukan oleh Depdiknas. Sistem yang bersifat sentralistik semacam ini dapat menurunkan kualitas hasil dalam kreativitas dan inovasi serta meminimalkan otoritas pengelola sekolah (Karmila & Wijaya, 2020). Sebab, setiap keputusan sekolah selalu ditentukan oleh manajemen birokrasi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang kemudian dalam prosesnya memunculkan beberapa masalah umum yang menghambat pengelolaan layanan pendidikan seperti keterlambatan waktu, keragu-raguan prosedur kerja, dan lain sebagainya karena semuanya ditentukan dari atas sementara apa yang menjadi kehendak arus bawah tidak tersalurkan secara tepat sasaran dan apa yang menjadi masalah sekolah sesungguhnya seringkali tidak memiliki solusi penyelesaian (Hakim, 2019; Ya et al., 2020).

Tujuan implementasi manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan kemandirian sekolah dalam menyelenggarakan program pendidikan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi dari berbagai unsur atau kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan mutu sekolah (Mustiningsih, 2015; Amon & Anggal, 2021). Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Sehingga diperlukan partisipasi dan kerja sama dari berbagai unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah terhadap manajemen pendidikan. Maka peneliti tertarik untuk menjadikan topik ini menjadi sebuah penelitian yang dirangkum dalam sebuah judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Literature Review sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data (Subagiya, 2023). Literatur yang digunakan mencakup berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, serta artikel relevan yang membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar.

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan mengidentifikasi literatur yang relevan yang memuat kriteria eksklusi yakni diterbitkan dalam 10 tahun terakhir yang topik bahasan utamanya mengkaji tema Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar.

Analisis data dilakukan dengan cara meninjau isi literatur untuk mendapatkan tema-tema utama seperti yang telah dijelaskan diatas. Kemudian, data dianalisis secara deskriptif untuk merumuskan pemahaman menyeluruh tentang isu yang diangkat dalam artikel ini. Penggunaan metode ini ditujukan untuk memberikan gambaran konseptual yang mendalam disertai bukti untuk



menjelaskan Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dampak bagi setiap warga Negara yang berusia 7-12 tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan masyarakat yang tidak mampu digratiskan tanpa pungutan biaya sampai mencapai usia wajib belajar 9 tahun.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari sejauhmana kebijakan tersebut terlaksana secara efektif. Dunn (2012:429) menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau dicapainya suatu tujuan berdasarkan tindakan. Subarsono (2015:89) mengungkapkan keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. (dwi Wahyuni et al. 2020) Berikut implementasi Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar yaitu:

1. Implementasi Fungsi Perencanaan

Implementasi manajemen pendidikan di sekolah dasar pada fungsi perencanaan, meliputi kegiatan yaitu sebagai berikut; perencanaan tujuan, perencanaan materi, perencanaan proses pembelajaran, perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran dan perencanaan calon siswa serta perencanaan guru.

Perencanaan tujuan memang sudah menjadi hal yang penting dalam implementasi manajemen pendidikan yang meliputi visi, misi, dan tujuan yang direncanakan yang selalu dilakukan evaluasi setiap satu tahun sekali. Apabila visi, misi dan tujuan tersebut kurang sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman dan IPTEK, maka dilakukan revisi atau perbaiki. Akan tetapi apabila masih cukup sesuai atau belum sepenuhnya tercapai maka dilakukan pengembangan. Sedangkan dari setiap guru mata pelajaran diwajibkan untuk dapat menyusun silabus dan atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang termasuk di dalamnya kegiatan merencanakan indikator kompetensi yang ingin dicapai.

Perencanaan materi dan perencanaan proses pembelajaran yaitu di dalam silabus dan RPP. Untuk itu perencanaan dari materi pelajaran sudah disesuaikan dengan kurikulum yang berjalan. Jarang terlihat guru-guru yang melakukan perencanaan materi pengayaan. Untuk metode pembelajarannya setiap pokok bahasan cukup bervariasi. Walaupun memang ada beberapa guru yang perencanaan metode pembelajarannya setiap pokok bahasanya hampir sama.

Juga kurikulum ini disusun dan dikembangkan sesuai pada tahapan-tahapan komponen perencanaan standar isi dalam hal ini pengembangannya untuk dapat mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial, masyarakat, kondisi budaya, usia peserta didik dan kebutuhan pembelajaran dengan menyajikan setiap paparan materi untuk seluruh mata pelajaran, serta muatan lokal menghadirkan materi yang menjadi unggulan, sehingga kurikulum berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.

Perencanaan sarana pembelajaran ini tidak hanya dibatasi dengan penggunaan kelas sebagai ruang belajar tetapi juga tempat di luar kelas, seperti perpustakaan, laboratorium, halaman sekolah, lapangan olahraga, dan atau ruang komputer. Alat pembelajaran yang digunakan juga cukup bervariasi seperti papan tulis, gambar-gambar, buku teks, benda-benda



yang berhubungan dengan kegiatan eksperimen, dan sebagainya. Setiap peserta didik dapat diberikan kebebasan dalam menggunakannya asalkan dalam penggunaannya sesuai dengan prosedur dan perawatannya. Dengan adanya sarana yang tersedia di SD ini dapat membantu mereka dalam mempelancar kegiatan pembelajarannya.

Perencanaan calon siswa, di setiap sekolah dasar tentu memberikan persyaratan khusus bagi yang ingin menjadi siswa di SD tersebut. Oleh karena itu calon siswa harus mengikuti berbagai seleksi yang cukup ketat baik secara tertulis dan wawancara. Dan sebelum mengikuti tes tertulis, calon siswa melalui seleksi administrasi, yang antara lain nilai rapor TK rata-rata 70 ataupun berdasarkan ketentuan masing-masing pihak sekolah. Jumlah siswa baru juga dibatasi sesuai dengan kecukupan ruang belajar, yang paling tinggi setiap satu kelasnya berjumlah 30 orang siswa ataupun berdasarkan ketentuan masing-masing pihak sekolah.

Perencanaan guru yang akan mengajar di setiap masing-masing kelas wajib dilakukan agar guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai di setiap kelas serta berdasarkan kompetensi guru tersebut. Dan bagi guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, pihak sekolah tentu dapat selalu berupaya meningkatkan kompetensinya dengan mengiikutsertakan pada kegiatan-kegiatan seminar, workshop, dan lain sebagainya. Dan walaupun guru tersebut yang mengajar bukan di bidangnya akan tetapi jika mereka memiliki keahlian dalam mata pelajaran tersebut mereka dapat menjadi tenaga pengajar disekolah.

2. Implementasi Fungsi Pengorganisasian

Implementasi manajemen pendidikan pada fungsi pengorganisasian yaitu; dengan adanya pembagian tugas yang jelas, adanya jaminan terhadap jabatan dalam organisasi, adanya balas jasa dan pembagian tugas/ jabatan sesuai dengan kompetensi.

Pembagian tugas, masing-masing mendapatkan SK dan uraian tugas yang harus dilaksanakan masing-masing sesuai dengan jabatan yang telah diserahkan kepadanya. Juga menunjukkan bidang tugas masing-masing disesuaikan dengan kemampuan dan bidang kerjanya, sehingga setiap guru dianggap telah mengetahui pelaksanaan dari tugasnya tersebut dengan baik. Penunjukan wali kelas disesuaikan dengan karakteristik siswanya, dalam artian untuk kelas yang siswanya butuh perhatian yang lebih maka wali kelasnya ditunjuk guru yang benar-benar mampu memenuhi kebutuhan siswa tersebut, seperti; sikap sabar, pengertian, mampu menjadi sahabat, berwibawa dan disegani siswa.

3. Implementasi Fungsi Penggerak

Adapun pengimplementasian manajemen pendidikan pada fungsi penggerak, meliputi kegiatan; pemimpin memberikan dan menjelaskan perintah, pemimpin selalu memotivasi anggotanya, pemimpin memberikan kesempatan pada anggotanya untuk dapat mengembangkan keterampilan, pemimpin memberikan kesempatan anggotanya untuk memberikan ide dan pendapatnya dan pemimpin selalu memberikan koreksi dengan objektif.

Pemimpin memberikan tugas yang harus mereka laksanakan dengan jelas. Setiap tugas-tugas yang diembankan pada mereka selalu diberikan penjelasan terlebih dahulu apa maksud dan tujuannya, serta bagaimana melaksanakannya, dan tanggung jawab apa yang harus mereka laksanakan dengan baik. Dan tentu dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk bertanya



dan dapat meminta penjelasan yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka masing-masing. Untuk memberikan perintah kepada guru dan pegawai lainnya para kepala sekolah selalu menyampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan perintah tersebut serta menjelaskan lebih terperinci bagaimana melaksanakannya dengan baik secara tertulis maupun lisan.

Selain itu pihak kepala sekolah selalu memberikan motivasi yang baik bagi para guru maupun dengan pegawai lainnya dengan mengadakan pendekatan secara emosional yaitu membentuk ikatan kekeluargaan yang erat antara pimpinan dan seluruh pegawainya, sopan santun, dan juga mau mendengarkan keluhan dari para anggotanya. Motivasi yang diberikan tidak hanya dapat melalui perlakuan yang sopan dan menghargai hasil kerja pegawainya, akan tetapi juga dapat memberikan motivasi melalui material. Misalnya bagi guru-guru maupun pegawainya yang berhasil menunjukkan kinerjanya dengan baik sehingga dapat mengantarkan siswa pada prestasi yang mengharumkan nama sekolah, maka tentu akan diberikan hadiah yang memang tidak terlalu besar nilainya akan tetapi menunjukkan penghargaan seorang pimpinan terhadap kinerja bawahannya.

Selain itu kepala sekolah juga dapat selalu memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengembangkan keterampilan diri. Kepala sekolah selalu mengikutsertakan para guru maupun pegawainya pada penataran, seminar, dan workshop yang berguna untuk meningkatkan kemampuan diri. Kepala sekolah juga selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sangat mendukung apabila ada guru yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan syarat tetap tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab profesinya.

Dalam melaksanakan kepemimpinannya kepala sekolah hendaknya selalu memberik koreksi akan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan para anggotanya. Dengan koreksi ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan hasil kerja para anggotanya.

4. Implementasi Fungsi Pengawasan

Dalam konteks manajemen pendidikan, pengawasan terhadap suatu program sekolah merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk dapat membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar-standar yang telah ditetapkan itu, menentukan apakah ada penyimpangan dan untuk mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya sekolah telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan pendidikan skala institusional maupun nasional.

Implementasi manajemen pendidikan pada fungsi pengawasan ini melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu; pemantauan, penilaian, dan pelaporan.

Pada kegiatan pemantauan hal yang dilakukan adalah: (1) memantau kegiatan yang dilakukan setiap anggota, (2) memantau pelaksanaan kegiatan planning, organizing, actuating, dan controlling, (3) memantau koordinasi dan komunikasi antar anggota, (4) pemberian bimbingan dan pengarahan.

Pada tahap penilaian ini meliputi kegiatan: (1) penilaian kompetensi pendidik menggunakan metode dan sarana pembelajaran, (2) penilaian sikap guru terhadap tugas dan



tanggung jawabnya, (3) penilaian terhadap kinerja, (4) penilaian terhadap hasil kerja, dan (5) penilaian terhadap seluruh proses manajemen.

Dan tahap terakhir adalah pelaporan meliputi kegiatan: (1) membuat laporan tertulis dan lisan tentang hasil pemantauannya, (2) membuat laporan tertulis dan lisan tentang hasil penilaiannya, dan (3) menindaklanjuti hasil laporan.

5. Implementasi Fungsi Evaluasi

Implementasi fungsi evaluasi ini dapat dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan untuk dapat mengetahui apakah tujuan pendidikan tercapai atau tidak. Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap kinerja guru, proses pembelajaran, dan pencapaian siswa.

Evaluasi pembelajaran ini, menggunakan berbagai metode evaluasi untuk menilai pemahaman dan keterampilan siswanya. Evaluasi ini dapat berupa ujian, tugas, proyek, dan observasi terhadap perkembangan karakter siswa. Pemantauan dari kinerja guru, melakukan evaluasi terhadap cara pengajaran dan pengelolaan kelas oleh guru untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Evaluasi proses manajerialnya, Menilai sejauh mana manajemen sekolah ini berjalan sesuai dengan rencana, serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Implementasi manajemen Pendidikan di sekolah dasar melalui; (1) Implementasi fungsi perencanaan, (2) Implementasi Fungsi Pengorganisasian, (3) Implementasi Fungsi Penggerak, (4) Implementasi Fungsi Pengawasan, dan (5) Implementasi Fungsi Evaluasi. Implementasi kebijakan pemerintah terhadap manajemen pendidikan di sekolah dasar menunjukkan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui desentralisasi, standar nasional pendidikan, program BOS, peningkatan kualitas guru, serta penerapan manajemen berbasis sekolah, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap sekolah dasar memiliki sumber daya yang memadai dan dapat menjalankan operasional yang efektif. Meskipun demikian, tantangan seperti ketimpangan kualitas antar daerah dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi perhatian. Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan siswa, serta mendukung perkembangan sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amon, L., & Anggal, N. (2021). Implementation of School-Based Management in Curriculum and Learning Processes: A Literatur Review. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(7), 90-98.
- Dunn, William N. 2012. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwi Wahyuni, Yayuk, A. Taqiyudin Absor, Ahmad Iqbal Hs, Radenintanacid MTsN, Lampung Selatan, Kementerian Agama kota Bandar Lampung, and Uin Raden Intan Lampung. 2020. "Al-Tadzkiyyah: IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN MUTU MTsN KOTA BANDAR LAMPUNG." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 11(2):295–318.



- Hakim, L. (2019). *MBS Kontemporer: Teori dan Praktik*. Jambi: Timur Laut Aksara.
- Karmila, N., & Wijaya, A. (2020). Implementation of school Based Management in Tambilung Elementary School. *Journal of Humanities and Social Studies*, 4(1), 71-73. <https://doi.org/10.33751/jhss.v4i1.2044>
- Munthihan. 2017. "Implementasi Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam SD Negeri 02 Rama Gunawan Seputih Raman Lampung Tengah". Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
- Mustiningsih. (2015). Masalah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar. *Manajemen Pendidikan*, 24(6), 498-505
- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tawa, Angelika Bule. 2019. "Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar." *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 4(2):107–17. doi: 10.53544/sapa.v4i2.82.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Sistem Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdiknas.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- Ya, K., Giatman, M., Rizal, F., & Wulansari, R. (2020). Revisiting the School-Based Management Recent Studies. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(2), 119-127. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/pedagogi.v20i2.897>